

**KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH:
PERSPEKTIF FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Moh. Faisal¹

Mohammad Rofik²

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Wiraraja
faisal114@wiraraja.ac.id

²Program Studi Manajemen, Universitas Wiraraja
rofik@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The quality of local government financial reports is a reflection of good local government governance, as a tool to realize transparent and accountable financial accountability. Internal and external factors can influence quality financial reports. The quantitative method was chosen as a tool to solve this problem, by distributing questionnaires to 33 SOPD in Sumenep Regency. Data analysis using multiple linear regressions. The results showed that the use of information technology, human resource competence, regional financial supervision, internal control, implementation of SAP, good governance affected the quality of local government financial reports, both partially and simultaneously. 70% of the quality of local government financial reports can be influenced by variables X1, X2, X3, X4, X5, and X6.

Keywords: *Quality of Financial Reports, Transparency, Accountability, Good Governance*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan pemerintah setiap periode. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sebagai bentuk petanggungjawaban, maka laporan keuangan pemerintah harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas setidaknya mampu memenuhi unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan

yang mengharuskan laporan keuangan dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2016:8-11).

Kualitas laporan keuangan yang memenuhi unsur karakteristik kualitatif sebagaimana disebutkan di atas akan berkontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Opini wajar merupakan cita-cita setiap pemerintah daerah, karena dengan demikian pemerintah dianggap mampu mengelola dan mengalokasikan keuangan daerah secara baik. Terbitnya Peraturan pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi pelaporan

keuangan dari sistem *cash basic* menjadi *accrual basic* dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kenyataan dalam mengwujudkan laporan keuangan yang berkualitas ternyata tidak mudah. “Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam hal kompetensi SDM, pegawai tidak memahami sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan LKPD” (Wati, 2014). Hal tersebut dikuatkan oleh data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, terdapat 411 LKPD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 113 LKPD mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 18 LKPD mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP).

Formulasi selain kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penelitian ini akan membahas juga faktor lain yang turut andil dalam mengwujudkan laporan keuangan yang berkualitas antara lain adalah faktor pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), dan tata kelola (*good governance*). Faktor-faktor

tersebut menitikberatkan pada penelitian yang dilakukan Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017); Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017); Kesuma, Anwar, dan Darmansyah (2017); Nantingkaseh, Ilat, dan Rondonuwu (2017); Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015).

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian memiliki riwayat laporan keuangan dengan opini WDP selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Namun, pada LKPD tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh opini WTP (BPK, 2018). Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dilakukan sebagai objek penelitian ini terdiri dari 33 satuan organisasi pemerintah daerah (SOPD).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor internal (kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, penerapan SAP, *good governance* dan faktor eksternal (pengawasan keuangan daerah) terhadap kualitas LKPD Kabupaten Sumenep. Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai literatur bagi akademisi dan praktisi akuntansi pemerintah, bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk mengwujudkan LKPD yang berkualitas.

Penelitian ini akan meneliti pengaruh faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas

LKPD. Faktor internal yang dimaksud terdiri dari kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, penerapan SAP, *good governance*, sedangkan faktor eksternal berupa pengawasan keuangan daerah. Secara rinci variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Kualitas Laporan Keuangan. LKPD merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan prinsip akuntabel dan transparan. Kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, sebagaimana disebutkan di atas. LKPD yang berkualitas menjadi bukti pemerintah daerah tersebut telah melaporkan dan menyajikan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP 71 Tahun 2010). Kualitas LKPD dapat diukur dengan menggunakan unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang meliputi relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (IAI, 2016:8-11).

Kedua, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi SDM akan menentukan kualitas LKPD. Pegawai yang memiliki kompetensi akan mampu menghasilkan LKPD yang andal, dan taat pada aturan yang berlaku, serta sebaliknya. Keberadaan pegawai

yang kompeten pada setiap SOPD akan banyak berkontribusi dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Kompetensi SDM dalam ini pegawai, dapat diukur dengan menggunakan indikator antara lain adalah pengetahuan, keahlian, dan perilaku.

Ketiga, Pemanfaatan Teknologi Informasi. Teknologi informasi menjadi hal penting dalam mensupport penyusunan LKPD, mengingat LKPD disusun dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan LKPD akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh pegawai menjadi hal mutlak dikuasai. Pemanfaatan teknologi informasi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang meliputi penggunaan komputer, penggunaan aplikasi keuangan, penggunaan jaringan internet, dan penggunaan jaringan terintegrasi antar data.

Keempat, Pengawasan Keuangan Daerah. Pengawasan keuangan daerah wajib hukumnya dilakukan, hal ini sesuai dengan amanah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan secara eksternal yang

dilakukan oleh Inspektorat ataupun BPK seyogyanya dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga tidak terdapat beberapa penyelewengan dan kesalahan yang akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengawasan pemerintah daerah adalah adanya evaluasi dari lembaga pemeriksa eksternal, tindak lanjut temuan pemeriksaan, dan keterlibatan lembaga pemeriksa eksternal dalam penyusunan laporan keuangan.

Kelima, Pengendalian Internal.

Keberadaan pengendalian internal pada setiap SOPD merupakan hal yang diharuskan, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang ada di SOPD tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan taat aturan. Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan mampu meningkatkan kualitas LKPD sehingga akan mempengaruhi opini laporan keuangan. Pengendalian internal yang efektif dan baik akan mampu mendeteksi berbagai salah saji yang bersifat material, kesalahan yang dilakukan, dan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Indikator yang digunakan dalam mengukur bentuk

pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, dan pemantauan.

Keenam, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan standar keuangan yang dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini SOPD untuk menyusun LKPD. Pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan dengan meinitberatkan pada SAP, maka laporan keuangan yang disajikan akan senantiasa taat dan patuh pada aturan yang ada, di samping akan menyajikan laporan keuangan secara wajar lebih-lebih saat ini sudah menggunakan basis akrual. Alhasil, laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Penerapan SAP ini dikukur dengan indikator kesesuaian dengan SAP.

Ketujuh, Good Governance.

“Pengelolaan keuangan sektor publik (dalam hal ini pemerintah daerah) perlu diwujudkan *good governance*, dimana pengelolaan dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Ulum dan Faisol, 2018:1). Pelaporan keuangan yang dilakukan dengan manajemen yang baik dan taat pada aturan yang berlaku akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tata kelola yang baik ini akan diukur dengan menggunakan

indikator antara lain adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, dan 3E (efektif, efisien, dan ekonomis).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif berbentuk hubungan kausalitas, di mana menguji pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap LKPD di Kabupaten Sumenep Tahun 2018. Jumlah populasi yang terdapat pada penelitian ini sebanyak 33 SOPD dan masing-masing SOPD diambil 2 orang perwakilan untuk mengisi kuisisioner dengan pertimbangan memiliki andil dalam penyusunan laporan keuangan masing-masing SOPD, sehingga 2 orang tersebut adalah kepala dan Bendahara SOPD. Alhasil, Diperoleh populasi sebanyak 66 responden yang diberikan kuisisioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem pengambilan sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Hal ini dilakukan mengingat jumlah populasi yang sedikit dan meningkatkan akurasi hasil penelitian ini. Sebanyak 66 kuisisioner

yang dikirim kepada responden, dan semuanya kembali. Namun, ada 1 jawaban responden yang tidak dapat digunakan (karena responden tidak menjawab sebanyak 3 item pernyataan), sehingga data valid yang dapat diujikan sebanyak 65 responden. Alat uji yang digunakan adalah SPSS dengan pendekatan regresi berganda, yang didahului dengan uji keabsahan data, uji asumsi (klasik), dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data kuisisioner yang disebar sebanyak 66 kuisisioner kepada responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Hasil pengujian validitas data yang menggunakan SPSS, terbukti variabel penelitian yang terdiri dari kualitas laporan keuangan (Y), pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi SDM (X2), pengawasan keuangan daerah (X3), pengendalian internal (X4), penerapan SAP (X5), dan *Good Governance* (X6) memiliki nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dengan tingkat toleransi 5% semua data dikatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Hasil Pengujian Validitas Data

Variabel		t _{hitung}	t _{tabel}	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,537	0,2441	Valid
	Y2	0,633	0,2441	Valid
	Y3	0,463	0,2441	Valid
	Y4	0,276	0,2441	Valid
Pemanfatan Teknologi Informasi (X1)	X1.1	0,518	0,2441	Valid
	X1.2	0,612	0,2441	Valid
	X1.3	0,790	0,2441	Valid
	X1.4	0,657	0,2441	Valid
Kompetensi SDM (X2)	X2.1	0,714	0,2441	Valid
	X2.2	0,509	0,2441	Valid
	X2.3	0,634	0,2441	Valid
	X2.4	0,512	0,2441	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah (X3)	X3.1	0,669	0,2441	Valid
	X3.2	0,693	0,2441	Valid
	X3.3	0,792	0,2441	Valid
Pengendalian Internal (X4)	X4.1	0,754	0,2441	Valid
	X4.2	0,707	0,2441	Valid
	X4.3	0,524	0,2441	Valid
	X4.4	0,586	0,2441	Valid
Penerapan SAK (X5)	X5.1	0,520	0,2441	Valid
	X5.2	0,706	0,2441	Valid
	X5.3	0,472	0,2441	Valid
	X5.4	0,684	0,2441	Valid
Good Governance (X6)	X6.1	0,317	0,2441	Valid
	X6.2	0,276	0,2441	Valid
	X6.3	0,533	0,2441	Valid
	X6.4	0,513	0,2441	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Pengujian reliabilitas data membuktikan bahwa variabel penelitian yang terdiri dari kualitas laporan keuangan (Y), pemanfatan teknologi informasi (X1), kompetensi SDM (X2), pengawasan keuangan daerah (X3), pengendalian internal (X4), penerapan SAP (X5), dan *good governance* (X6) memiliki nilai alpha > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel adalah tepat dan konsisten,

sehingga variabel-variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1.2.

Selain dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data, penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik. Hasil pengujian asumsi klasik antara lain adalah sebagai berikut. *Pertama, pengujian normalitas data*, dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.2
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Tingkat Signifikansi	Keterangan
X1	0,812	0,60	Reliebel
X2	0,775	0,60	Reliebel
X3	0,846	0,60	Reliebel
X4	0,815	0,60	Reliebel
X5	0,781	0,60	Reliebel
X6	0,613	0,60	Reliebel

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Tabel 1.3
Hasil Pengujian Normalitas Data

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		65
Normal Parameters ^a	Mean	0
	Std. Deviation	0,95197164
Most Extreme Differences	Absolute	0,06
	Positive	0,06
	Negative	-0,059
Kolmogorov-Smirnov Z		0,486
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,972
a. Test distribution is Normal.		

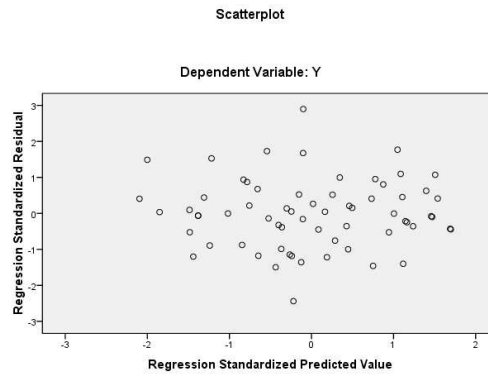
Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. $0,972 > 0,05$ sehingga proses pengujian dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Kedua, pengujian heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, maka diperoleh hasil yang disajikan pada gambar 1.1.

Dengan menggunakan metode scatterplot sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 di atas dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas, karena tidak terdapat pola tertentu yang ada pada grafik. Ketiga, pengujian

multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 1.4.

Pada tabel 1.4 secara jelas dapat dilihat bahwa nilai VIF berada diantara nilai 1 sampai nilai 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas data pada penelitian ini. *Kelima, pengujian autokorelasi.* Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan indikator $du < DW < 4-du$ ($1,76 < 1,93 < 2,1$), maka dalam pengujian ini tidak terdapat autokorelasi. *Keempat, pengujian linearitas.* Distribusi linearitas dapat dilihat dari hasil pengujian pada gambar 1.2.



Gambar 1.1

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

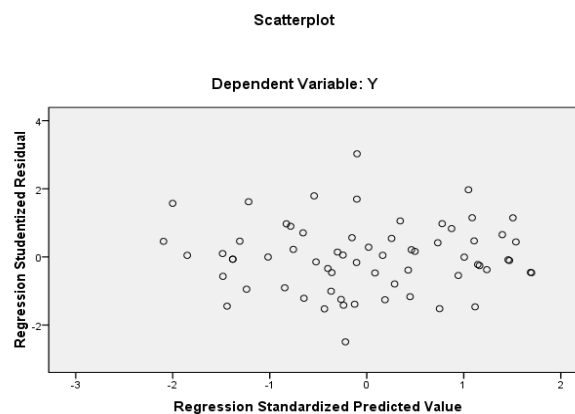
Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Tabel 1.4

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	Indikator (Diantara)	Keterangan
X1	2,690	1-10	Tidak ada
X2	2,256	1-10	Tidak ada
X3	2,640	1-10	Tidak ada
X4	1,851	1-10	Tidak ada
X5	4,067	1-10	Tidak ada
X6	1,327	1-10	Tidak ada

Sumber: Data diolah peneliti (2019)



Gambar 1.2

Hasil Pengujian Linearitas

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Pada gambar 1.2 di atas terlihat bahwa variabel X membentuk distribusi linear terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y).

Berdasarkan hasil pengujian validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik, maka dilakukan pengujian hipotesis terhadap data penelitian. Pengujian hipotesis penelitian dengan

menggunakan model regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa variabel X (yang terdiri dari enam variabel) berpengaruh terhadap variabel Y, baik dilakukan secara parsial maupun dilakukan pengujian secara simultan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 1.6.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi SDM (X2), pengawasan keuangan daerah (X3), pengendalian internal (X4), penerapan SAP (X5), dan

Good Governance (X6) berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan, hal ini karena masing-masing nilai sig. lebih kecil dari 0,05. Hal ini juga dibuktikan pada hasil pengujian secara bersama-sama (simultan) menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 berpengaruh terhadap variabel Y, di mana sig. 0,000 < 0,05. Hasil pengujian secara simultan dapat dilihat pada tabel 1.6.

Sementara untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.5

Hasil Pengujian Hipotesis (Parsial)

Variabel	Signifikasi	Toleransi	Keterangan
X1	0,012	0,05	Berpengaruh
X2	0,027	0,05	Berpengaruh
X3	0,020	0,05	Berpengaruh
X4	0,033	0,05	Berpengaruh
X5	0,018	0,05	Berpengaruh
X6	0,036	0,05	Berpengaruh

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Tabel 1.6

Hasil Pengujian Hipotesis (Simultan)

ANOVA^b

<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
244,498	6	4,083	24,564	0,000 ^a
9,641	58	0,166		
34,138	64			

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti (2018)

Tabel 1.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.847 ^a	0,718	0,688	0,40770	1,934

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Tabel 1.7 di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan (Y) mampu dijelaskan oleh variabel X sebesar 70% (pembulatan dari 0,688), sedangkan sebesar 30% dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar variabel penelitian ini. Konstruk ini dianggap baik karena variabel X mampu menjelaskan variabel Y sebesar 70% (lebih dari 50%). Pembahasan terkait hasil pengujian hipotesis akan diuraikan secara detail sebagai berikut.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) berpengaruh terhadap kualitas LKPD, karena nilai sig. $0,012 < 0,05$. Kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pegawai, mengingat seluruh komponen LKPD berbasis teknologi informasi berupa sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIAKD).

SIAKD yang digunakan oleh pemerintah daerah akan mempermudah pengguna dalam membuat laporan keuangan, dengan penguasaan dan pemanfaatan sistem tersebut maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyusunan laporan keuangan lebih efektif, efisien, dan akurat. Hal tersebut karena, sistem penggunaan data keuangan yang terintegrasi akan membuat akses pengambilan data lebih cepat, tidak melakukan entry berkali-kali. Di samping itu akan lebih akurat, karena data-data yang diakses menggunakan data base yang sudah ada di dalam komputer, dan jika terjadi kesalahan dalam *entry* data pengguna akan mendapatkan *warning* (peringatan) bahwa data yang *dientry* adalah salah. Alhasil adalah dengan pemanfaatan SIAKD secara maksimal, maka akan mampu meningkatkan kualitas LKPD. Hasil data jawaban responden juga memberikan informasi bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa

teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas LKPD.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017); Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017); Nantingkaseh, Ilat, dan Rondonuwu (2017); Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015), bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD, hal ini dapat dilihat nilai sig. $0,027 < 0,05$. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah juga harus didukung oleh kompetensi SDM yang mumpuni, mengingat aturan LKPD berkualitas. Tingkat pemahaman, keahlian, dan perilaku yang dimiliki oleh pegawai dalam menyusun laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas LKPD. Walaupun penyusunan LKPD dalam bentuk aplikasi SIAKD, namun aplikasi tersebut butuh keterampilan dan kemampuan khusus untuk mengaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan. Jawaban yang sama dalam kuisioner responden menyatakan bahwa mereka sangat setuju

dengan kompetensi SDM yang baik, akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Peneliti lain yang mengamini hasil ini adalah Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017); Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017); Nantingkaseh, Ilat, dan Rondonuwu (2017); Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015) bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai sig. $0,020 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hakekat fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat merupakan bagian dari rangkaian tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik, sebagai alat untuk mendeteksi secara dini kondisi laporan keuangan yang dibuat oleh SOPD. Bentuk pendeteksian yang dilakukan menjadi penting, karena dengan adanya pendeteksian secara dini sebelum diaudit oleh BPK akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah berupa kesempatan untuk memperbaiki laporan keuangan

yang disusun. Di sisi lain, dengan adanya pengawasan keuangan daerah akan mampu mengontrol sumber dan alokasi keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, dan taat pada aturan yang berlaku. Alhasil, laporan keuangan yang direview oleh pengawas keuangan daerah akan memaksimalkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga opini laporan keuangan tersebut adalah WTP. Kondisi ini selaras dengan objek penelitian ini, bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep sejak tahun 2017 memiliki opini laporan keuangan WTP. Simetris juga dengan jawaban responden yang mengungkapkan bahwa mereka sangat setuju (SS) bahwa pengawasan keuangan daerah mampu meningkatkan kualitas LKPD.

Beberapa peneliti yang sejalan dengan penelitian ini adalah Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017); Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017); Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015) bahwa dengan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif dan rutin akan mampu meningkatkan kualitas LKPD tersebut, sebagaimana juga diamanahkan Permendagri No 51 Tahun 2010.

Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal

memiliki nilai sig. $0,033 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pengendalian internal merupakan salah satu filter yang mendorong kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Adanya peran pengendalian internal dalam hal ini atasan yang senantiasa memberikan arahan, kendali, dan evaluasi akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terbebas dari saji yang bersifat material, sehingga laporan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Keberadaan pengendalian internal juga sebagai partner kerja yang secara bersama-sama akan mampu memberikan solusi atau pemecahan masalah atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh masing-masing SOPD khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Berkaitan dengan ini, *stewardship theory* menyiratkan bahwa manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* dalam menggunakan keuangan daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas yang diberikan atasannya penuh tanggung jawab (dalam hal ini menyajikan laporan keuangan dengan wajar dan berkualitas).

Fakta data penelitian juga menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar adalah sangat setuju, sehingga mereka sepakat bahwa dengan pengendalian internal yang baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik pula. Hasil ini didukung oleh Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017).

Penerapan SAP Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan SAP memiliki nilai sig. $0,018 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Indikator keberhasilan laporan keuangan yang berkualitas dibuktikan dengan adanya komitmen dari SOPD dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah, hal ini sesuai dengan amanah PP Nomor 71 tahun 2010. Penerapan SAP merupakan suatu keharusan untuk ditunaikan oleh setiap SOPD, sehingga secara tidak langsung laporan keuangan yang disusun mengikuti ketentuan SAP akan memenuhi unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berkualitas. SOPD yang menerapkan SAP akan mampu meningkatkan kualitas LKPD, hal ini juga sesuai dengan predikat opini WTP oleh Kabupaten Sumenep. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017). Hal tersebut juga ditunjukkan oleh jawaban responden bahwa mereka sangat setuju jika SOPD yang menerapkan SAK akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Good Governance Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan SAP memiliki nilai sig. $0,036 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tata kelola yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam peLKPD, sehingga dengan demikian berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. SOPD yang taat pada prinsip akuntabilitas dan transparansi tentu akan menggunakan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis serta menyajikan secara wajar pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan secara wajar akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SOPD. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan responden yang mayoritas sangat setuju bahwa *good governance* mampu membuat LKPD berkualitas. Hasil ini didukung oleh penelitian Kesuma, Anwar, dan Darmansyah (2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan: (1) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas LKPD, semakin aktif pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik; (2) kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD, semakin kompeten dan memiliki tingkat pemahaman yang baik pegawai maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik; (3) pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD, semakin efektif pengawasan yang dilakukan maka kualitas laporan keuangan semakin baik; (4) pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD, semakin baik pengendalian internal yang ada pada masing-masing SOPD, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan; (5) penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD, karena hal ini wajib dilakukan sehingga laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAP dan menjadikan laporan keuangan tersebut berkualitas; (6) *good governance* berpengaruh terhadap kualitas LKPD, karena akan mendorong pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan keuangan menjadi berkualitas.

Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengembangan

dari penelitian ini dengan cara meneliti pada kabupaten/kota yang berbeda, kementerian/ lembaga yang berbeda, dan bahkan pada entitas swasta untuk beberapa variabel. Dengan demikian akan sampai pada titik temu bahwa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas syarat dengan beberapa faktor di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, L., Drwanis, dan Abdullah, S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*; Vol. 3, No. 2, September 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Kesuma, D., P., Anwar, C., dan Darmansyah. Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*; Vol. 1, No. 2, Desember 2017 hal. 141-146.
- Megayanti, A., P., Adiputra, I., M., P., dan Sinarwati, N., K. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*; Vol. 3, No. 1, Tahun 2015 Hal. 1-12.
- Nantingkaseh, R., L., V., Ilat, V., dan Rondonuwu, S. Pengaruh Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pengelola

- Keuangan Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pada Skpd Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*; Vol. 12, No. 2, Tahun 2017 hal. 61-68.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ulum, I, dan Faisol, M. (2018). *Audit (Sektor) Publik: Kerangka Kerja dan Pedoman Implementasi Audit Keuangan Pemerintah dan Audit Khusus Lainnya*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Wati, K., D., H., dan Sinarwati, K. Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*; Vol. 2, No. 1, Tahun 2014.
- Wibawa, K., A., S., Sinarwati, N., K., dan Yuniarta, G., A. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Kabupaten Buleleng. *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*; Vol. 2, No. 8, Tahun 2017.

www.bpk.go.id